

02 GOVERNMENTTODAY
Gaji Hakim Dinaikkan,
Prabowo: Agar Tidak Bisa Dibeli

05 HAJI 2025
Kuota Haji RI Batal Dikurangi,
tapi Ada 4 Catatan 'Merah' dari Saudi

10 PLESIRAN
Siapa Sangka, Bekas Tambang
Jadi Surga Wisata



Air India Jatuh, Ratusan Penumpang Tewas

Pesawat Air India jenis Boeing 787-8 Dreamliner jatuh di Kota Ahmedabad 5 menit, Kamis (12/6/2025) setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel. Pesawat yang mengangkut 230 penumpang beserta 2 pilot-kopilot dan 10 awak kabin itu jatuh di area permukiman. Berita lengkap baca halaman 12. (reuters,ist)

UTANG NEGARA DAN UTANG RAKYAT KOMPAK MELESAT



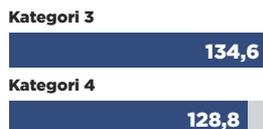
Tak hanya negara alias pemerintahannya yang 'tertimbun' utang, rumah tangga masyarakat Indonesia saat ini juga terimpit pinjaman. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Mei 2025 yang menunjukkan adanya

kenaikan proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk membayar utang, dari 10,5% pada April menjadi 10,8% di bulan Mei 2025. Ini mengindikasikan pola konsumsi rumah tangga yang mulai bergeser ke arah utang sebagai penopang gaya hidup. Sementara, beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025, yakni sebesar Rp178,9 triliun. Berdasarkan dokumen Profil Utang Pemerintah Pusat edisi Mei 2024, utang jatuh tempo pemerintah pusat adalah Rp800,33 triliun pada 2025. Hal tersebut terdiri dari Rp705,5 triliun SBN dan Rp94,83 triliun pinjaman. Namun, kebutuhan pembayaran utang pemerintah pada 2025 lebih melesat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 434,29 triliun. Kenaikan ini karena utang pemerintah pada masa pandemi Covid-19 mulai jatuh tempo pada 2025. Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki utang kepada BI berupa burden sharing mencapai Rp 100 triliun yang juga jatuh tempo pada 2025. Banyaknya?!

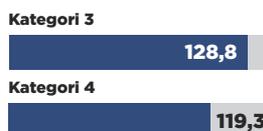
Baca Hal 11...

INDEKS PENGHASILAN SAAT INI PER KELOMPOK USIA (2025)

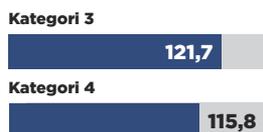
Kelompok Usia 20-30 tahun:



Kelompok Usia 31-40 tahun:



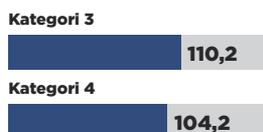
Kelompok Usia 41-50 tahun:



Kelompok Usia 51-60 tahun:

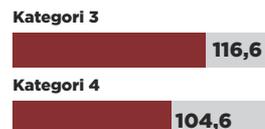


Kelompok Usia >60 tahun:



INDEKS PENGHASILAN SAAT INI PER KELOMPOK PENGELUARAN (2025)

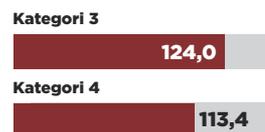
Pengeluaran Rp1-2 juta:



Pengeluaran Rp2,1-3 juta:



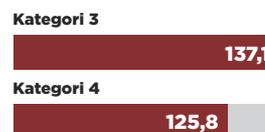
Pengeluaran Rp3,1-4 juta:



Pengeluaran Rp4,1-5 juta:



Pengeluaran >Rp5 juta:



GAJI HAKIM DINAIKKAN, PRABOWO: AGAR TIDAK BISA DIBELI

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan menaikkan gaji hakim di Indonesia agar para 'Wakil Tuhan' itu tidak dapat dibeli. Kenaikan tertinggi naik 280 persen untuk golongan junior.

Presiden RI Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji hakim di Indonesia. "Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen," katanya dalam pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

"Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli," tegasnya.

Alasan lain Prabowo menaikkan gaji hakim adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim di Indonesia. Demi mewujudkannya, ia sudah menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mencari anggaran untuk menaikkan gaji hakim.

"Dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya, tni mendukung, Kejaksaan semua bekerja, kita akan tertibkan negara ini. Kita akan bikin Indonesia berhasil karena sistem hukumnya yang baik," ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, kenaikan gaji paling tinggi akan mencapai angka 280 persen. Lanjutnya, kenaikan gaji tertinggi itu akan diberikan kepada hakim yang paling junior. "Di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah," kata Prabowo disambut tepuk tangan meriah. Baca

Ia pun menegaskan semua hakim akan mendapat kenaikan gaji secara signifikan. Namun, ia tak merincikan detailnya dalam acara tersebut.

Diketahui, gaji hakim terakhir naik pada Jumat (18/10/2024), yang ditetapkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Kenaikan gaji hakim itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan PP



Presiden Prabowo dalam upacara pengukuhan hakim se-Indonesia di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025). (ist)

Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan PP tersebut, hakim golongan terendah adalah golongan IIIa dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Hakim golongan tersebut mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 2.785.700. Jika gaji pokok sebesar Rp 2.785.700 naik menjadi 280 persen seperti kata Prabowo, hakim golongan IIIa setidaknya mendapatkan kenaikan gaji mencapai Rp 7.799.960.

Sedangkan yang tertinggi

berdasarkan PP tersebut adalah hakim golongan IVe dengan masa kerja hingga 32 tahun. Hakim golongan tersebut mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 6.373.200. Jika gaji pokok sebesar Rp 6.373.200 naik menjadi 280 persen, hakim golongan IVe akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp 17.844.960.

Ketua MA: Indonesia Kurang Hakim

Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto mengungkapkan kondisi peradilan di Indonesia yang masih

kekurangan tenaga pengadil atau hakim. Dia menyebut, pada 2024, MA hanya memiliki 7.260 hakim yang harus mengurus 3.081.090 perkara.

Padahal, pada beberapa bidang, satu perkara bisa ditangani sekitar tiga orang hakim atau memakai sistem majelis. Sehingga, jika sekadar membagi rerata, satu orang hakim bisa menangani 425 hingga 1274 perkara per tahun.

"Jumlah tersebut, tentu masih belum dapat dikatakan ideal," kata Sunarto dalam pidatonya, Kamis (12/6/2025).

Dia pun mengungkap ada sedikit angin segar karena hari ini ada pengukuhan 1.451 hakim baru. Mereka terdiri dari 921 orang hakim untuk Peradilan Umum; 362 hakim untuk Peradilan Agama; 143 orang hakim untuk peradilan tata usaha negara; dan 25 hakim untuk peradilan militer.

"Dengan dikukuhkannya 1.451 orang hakim hari ini, maka akan menambah jumlah hakim yang telah ada yaitu 7.260 orang sehingga menjadi 8.711 orang hakim," ujar Sunarto. (wid,ist,rls,tmo/dya)

Anggaran TNI-Polri Dikurangi, Kapolri: Bercanda Itu

Presiden RI Prabowo Subianto berkelakar rela memotong anggaran TNI dan Polri demi menaikkan gaji hakim di Indonesia.

Ia menyampaikan itu di acara pengukuhan hakim di lingkungan Mahkamah Agung, Kamis (12/6/2025).

"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi di sini, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyatakan penegakan hukum di Indonesia kerap terputus di tengah jalan. Para koruptor itu berhasil ditindak oleh penegak hukum, namun kerap lolos di pengadilan.

"Percuma kita punya polisi yang hebat tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri," ucapnya.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menanggapi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk memotong anggaran TNI dan Polri

untuk menaikkan gaji hakim. Saat ditanya, Sigit hanya tersenyum lebar mendengar rencana yang baru tadi pagi disampaikan Presiden Prabowo. "Nah, ini susah jawabnya," ujar Sigit saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sambil tertawa, Sigit mengatakan, "Bercanda itu."

Komisi III DPR RI mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji para hakim di seluruh Indonesia.

Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, berharap tidak ada lagi hakim yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Hasbi, kenaikan gaji hakim merupakan bentuk penguatan institusi peradilan agar semakin independen dan profesional. Kebijakan itu juga menjadi bukti perhatian Presiden Prabowo terhadap para hakim dan penegakan hukum di Indonesia.

"Sudah saatnya para hakim mendapatkan kesejahteraan yang layak agar bisa menjalankan

tugasnya dengan integritas tinggi, tanpa tergoda oleh rayuan uang dan kepentingan," ujar Hasbi dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

Meski begitu, Hasbi juga memberikan peringatan keras kepada para hakim agar tidak lagi terlibat dalam praktik-praktik korupsi. Kenaikan gaji ini harus diiringi dengan peningkatan moralitas dan komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih.

"Kita tidak ingin lagi melihat ada hakim yang duduk di kursi pesakitan karena menyalahgunakan kewenangannya. Kenaikan gaji ini harus menjadi momentum bagi Mahkamah Agung dan seluruh jajaran peradilan untuk bersih-bersih secara total," kata Legislator PKB ini.

Legislator asal Dapil Jakarta I itu pun menyinggung beberapa kasus yang mencoreng citra lembaga peradilan. Seperti kasus suap yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimiyati yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2022 terkait jual beli perkara di Mahkamah Agung. (wid,rls,ant/dya)

Asuransi Kesehatan Tak Lagi Cair 100% ke Pemilik

DPR PERTANYAKAN ATURAN OJK

Aturan baru nasabah turut menanggung biaya (co-payment) paling sedikit 10% dari total nilai pengajuan klaim untuk produk asuransi kesehatan dipertanyakan DPR RI.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DRP) Mukhamad Misbakhun akan mendorong pimpinan Komisi XI DPR untuk mengagendakan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Misbakhun mengatakan, aturan itu belum pernah dibicarakan sebelumnya dengan Komisi XI DPR. Maka, rapat dengan OJK bertujuan untuk mengetahui dasar, alasan, dan argumentasi dari otoritas mengenai aturan baru yang berlaku 1 Januari 2026 tersebut.

"Co-payment belum pernah dibicarakan sebelumnya dengan komisi XI. Saya nanti akan mengajak pimpinan yang lain, mengagendakan rapat dengan OJK untuk mengetahui dasar, alasan, dan argumentasi kenapa OJK merencanakan ini," ujar Misbakhun saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Misbakhun mengamini mendapatkan informasi bahwa pembayaran klaim asuransi kesehatan mengalami peningkatan signifikan dan memberikan tekanan terhadap kesehatan industri asuransi. Namun, Komisi XI juga perlu mendengarkan latar belakang dari hal tersebut.

"Jangan sampai [aturan baru asuransi] kemudian memberikan tekanan balik terhadap industri itu tentang kepercayaan kepada industri asuransi yang pada saat ini sedang kita upayakan membangun kembali kepercayaan konsumen masyarakat kepada industri asuransi," ujarnya.

"Pada saat masyarakat membeli polis asuransi itu ada perjanjian di dalam polis yang seharusnya cukup memadai untuk kemudian tidak terbit aturan co-payment itu. Kenapa masih perlu? Harusnya polis itu hubungan bisnis bilateral antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi."

Selain itu, Misbakhun juga mempertanyakan OJK yang mengeluarkan peraturan secara spesifik mengenai co-payment. Menurutnya, otoritas seharusnya menyusun aturan untuk membangun industri asuransi yang sehat, memberikan perlindungan kepada

konsumen dan melakukan tugas-tugas pengawasan.

"Nanti kita tanyakan kenapa tiba-tiba lahir aturan itu. Padahal kan secara khusus spesifik ini kan sebenarnya harusnya tidak ke sana," cerita dia.

OJK mewajibkan nasabah asuransi kesehatan untuk membayar paling sedikit 10% dari total pengajuan klaim untuk produk asuransi kesehatan dengan prinsip ganti rugi (indemnity) dan produk asuransi dengan skema pelayanan kesehatan yang terkelola (managed care). Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dalam hal ini, OJK mengatur produk asuransi kesehatan harus menerapkan co-payment yang ditanggung oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling sedikit 10% dengan batas maksimum Rp300.000 untuk rawat jalan per pengajuan klaim dan Rp3 juta untuk rawat inap per pengajuan klaim.

Ketentuan itu sebagaimana



(Ilustrasi) Aturan Co-payment tidak berlaku bagi BPJS. Ini hanya berlaku bagi asuransi komersial dan polis yang masih berjalan. (Ist)

termaktub dalam Surat Edaran OJK Nomor 7/SE/OJK.5/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Beleid ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan bahwa tujuan penerbitan aturan tersebut untuk mendorong setiap pihak dalam ekosistem asuransi kesehatan agar dapat memberi nilai tambah bagi upaya efisiensi biaya kesehatan dalam jangka panjang.

Dia mengklaim hal ini dilakukan mengingat tren inflasi medis yang terus meningkat dan jauh lebih tinggi dari inflasi umum, dan tidak hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di seluruh

dunia.

"Aturan ini untuk mendorong pemanfaatan layanan medis dan layanan obat yang lebih berkualitas serta akan mendorong premi asuransi kesehatan yang lebih terjangkau karena peningkatan premi dapat dimitigasi dengan lebih baik," ujar Ismail dalam siaran pers, dikutip Selasa (10/6/2025).

OJK juga menilai, berdasarkan pengalaman di berbagai negara, termasuk Indonesia, mekanisme co-payment atau deductible akan mendorong peningkatan kesadaran pemegang polis atau tertanggung dalam memanfaatkan layanan medis yang ditawarkan oleh fasilitas kesehatan. (din, blo, ist/dya)

Menkes Budi: Agar Warga Jaga Kesehatan

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan aturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan nasabah asuransi kesehatan membayar paling sedikit 10% dari total pengajuan klaim bisa memberikan manfaat untuk mendidik nasabah agar menjaga kesehatan.

Budi mengatakan, ketentuan pembagian risiko (co-payment) juga sudah diterapkan pada asuransi kendaraan. Menurutnya, ketentuan yang mengharuskan nasabah tetap membayar di asuransi kendaraan membantu agar lebih berhati-hati dalam berkendara.

"Sama seperti asuransi kendaraan, selalu kalau kita ada tabrakan, kita mesti bayar sedikit. Itu saya rasa bagus karena mendorong agar masyarakat lebih hati-hati dalam berkendara. Sebab dia tau kalau ada apa-apa, dia tetap harus mengeluarkan uang walaupun sedikit," ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

"ini sama, saya rasa ini bagus untuk mendidik pemegang polis asuransi swasta sehingga mereka jaga kesehatan, kalau bisa tidak sakit."

Kendati demikian, Budi mengaku masih harus mempelajari lebih dalam lagi mengenai aturan yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2026 tersebut.

Sbelumnya, OJK juga menilai, berdasarkan pengalaman di berbagai negara, termasuk Indonesia, mekanisme co-payment atau deductible akan mendorong peningkatan kesadaran pemegang polis atau tertanggung dalam memanfaatkan layanan medis yang ditawarkan oleh fasilitas kesehatan.

Dalam hal ini, OJK mengatur produk asuransi kesehatan harus menerapkan pembagian risiko (co-payment) yang ditanggung oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling sedikit 10% dengan batas maksimum Rp300.000 untuk rawat jalan per pengajuan klaim dan Rp3 juta untuk rawat inap per pengajuan klaim.

Di sisi lain, OJK mengatur bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi dapat menerapkan batas maksimum yang lebih tinggi sepanjang disepakati antara perusahaan dengan pemegang polis, tertanggung atau

peserta serta telah dinyatakan dalam polis asuransi.

"Co-payment tersebut hanya berlaku untuk produk asuransi kesehatan dengan prinsip ganti rugi [indemnity] dan produk asuransi dengan skema pelayanan managed care," sebagaimana dikutip melalui beleid tersebut.

Berdasarkan beleid tersebut, asuransi indemnity adalah penggantian biaya perawatan medis dengan maksimum penggantian yang ditagihkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan dibayarkan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan pada polis asuransi.

Sementara itu, asuransi managed care adalah pelayanan kesehatan dengan rujukan berjenjang dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan medis yang dimulai dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar/umum, hingga fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspecialis. (wid,rls,ant/dya)



Penampakan dari udara proyek Tanggul Cegah Pesisir Jakarta amblas. (Dok. PUPR)

BELUM ADA INVESTOR LIRIK PROYEK GIANT SEA WALL

Presiden Prabowo Subianto mengatakan megaprojek giant sea wall atau tanggul laut raksasa akan segera dikerjakan. Ia menyebut tak akan menunda lagi proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 ini.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan proyek besar tanggul laut raksasa atau giant sea wall hingga saat ini belum kunjung menunjukkan ketertarikan dari para investor.

Hal tersebut dia ungkapkan lantaran proyek, yang juga dicanangkan sejak era Presiden Joko Widodo tersebut hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan konsep.

"Belum [ada calon investor yang tertarik]," ujar Dody kepada wartawan di selama acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

"Karena proyek ini masih dalam tataran konsep, jadi belum sampai bisa dibuang ke investor," sambungnya menegaskan.

Meski demikian, Dody memastikan perencanaan proyek tersebut akan rampung secepatnya. Otoritas infrastruktur negara, kata dia, sebelumnya juga telah membangun sejumlah tanggul laut yang dilakukan dalam beberapa fase.

Kementerian PU sebelumnya juga melaporkan telah membangun tanggul pantai di Jakarta mencapai total panjang 14,75 km, yang terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol dan Dadap.

Kemudian, ada juga di wilayah pesisir Kabupaten Semarang hingga Demak Jawa Tengah. Tetapi, ini terhenti lantaran investor tidak didukung untuk membangun di wilayah lain.

"Dari PU kan fase per fase kan sudah kita kerjakan, Jakarta sudah kerjakan, Semarang-Demak sudah dikerjakan, tapi beberapa hal juga masih

belum smooth," tutur dia.

Dia juga memastikan pemerintah akan membuat konsep proyek ambisius ini agar lebih menarik investor, dengan berbagai tawaran yang kreatif.

"Jadi pemerintah sudah nggak ikut campur lagi. Semaksimalnya kalau bisa begitu [pendanaan penuh dari investor]. Tapi kan nggak semua proyek itu bisa di user charge."

Proyek giant sea wall sendiri saat ini dapat dibidang kembali diseriusi oleh pemerintah, seusai Presiden menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Ratas tersebut diketahui membahas rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di kawasan pesisir Utara Pulau Jawa, bersama dengan sejumlah kabinet menteri.

"Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, Selasa," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan

resminya.

Teddy mengatakan, ratas tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menghadapi tantangan iklim dan naiknya permukaan laut.

Rencana tersebut, lanjut dia, juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

"Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih," tuturnya.

Lindungi Pesisir

Belakangan, Kementerian PU juga tengah menyiapkan proses lelang pembangunan lanjutan tanggul laut Tahap 7 paket 1 tepatnya di kawasan Kali Ancol dan Kali Dadap sepanjang 100 meter, melalui anggaran negara, yang dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025. Status saat ini dalam persiapan lelang.

Pembangunan Tahap 7 dalam paket selanjutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing, dengan anggaran yang masih dalam tahap pengusulan dari sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

yang dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027.

Terpisah, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim ada investor yang ingin menggarap proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Namun, kata dia, pemerintah masih mempelajari dan membuka ruang untuk semua pihak.

"Kami tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena, sekali lagi, ini adalah proyek besar," kata AHY dalam konferensi pers acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu, (11/6/2025).

Ihwal kebutuhan pembiayaan, AHY mengatakan proyek giant sea wall membutuhkan anggaran sekitar Rp 123 triliun. Namun, anggaran tersebut baru sebatas untuk pembangunan tanggul laut di wilayah Jakarta. "Kurang lebih 41 kilometer," kata dia.

Pemerintah akan membangun giant sea wall di pantai utara Jawa untuk melindungi masyarakat di pesisir agar tidak tenggelam. Hal ini seiring penurunan muka tanah dan semakin tingginya air laut. Namun, kata AHY, tanggul laut maupun tanggul pantai tidak cukup untuk melindungi masyarakat pesisir. Ia berujar, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan dari hulu ke hilir. (wid,rls,ant/dya)

Prabowo: Saya Akan Bentuk Badan Otorita

PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk membangun mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) mencapai US\$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.300 triliun (kurs Rp 16.250). Proyek ini akan terbentang sekitar 500 kilometer (km) sepanjang pesisir pantai utara (pantura) Jawa, tepatnya dari Tangerang sampai Gresik.

"Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Bayangkan, sejak tahun 1995, 30 years lalu kalau tidak salah ya. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera," kata

Prabowo saat memberikan sambutan di acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Prabowo menyebut tanggul laut akan dibangun dengan panjang 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur. Anggaran yang dibutuhkan sekitar USD 80 miliar dengan target waktu penyelesaian hingga 20 tahun lamanya.

"Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa timur mungkin membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun," ujarnya.

Prabowo tak masalah dengan perencanaan itu. Dalam waktu dekat pihaknya sudah memerintahkan kementerian terkait untuk roadshow

dan membentuk badan otorita.

"Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno. Perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu saya sudah perintahkan satu tim untuk roadshow keliling. Dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," ujarnya.

Prabowo tidak tahun siapa presiden yang akan menyelesaikan proyek itu. Ia menegaskan akan memulai terlebih dahulu sesegera mungkin.

"Tapi ini vital dan ini suatu megaprojek. Saya akan mulai. Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi kita harus mulai dan kita akan mulai," ujarnya. (wud rla,ist/dya)

KUOTA HAJI RI BATAL DIKURANGI, TAPI ADA 4 CATATAN 'MERAH' DARI SAUDI

Arab Saudi memberi sejumlah catatan 'merah' bagi Indonesia dalam pelaksanaan haji tahun ini. Bahkan sampai berwacana memotong kuota haji tahun depan. Meskipun akhirnya rencana itu dibatalkan.



Jamaah haji gelombang satu secara bertahap telah tiba di tanah air pada Kamis (12/6/2025). Tampak suasana haru saat jamaah bertemu keluarganya. (Ist.antara)

Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M telah memasuki fase pemulangan jamaah ke Tanah Air. Catatan disampaikan Arab Saudi dalam pertemuan antara Deputi Menteri Haji Arab Saudi dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI Mochamad Irfan Yusuf di Jeddah pada Selasa (10/6/2025).

Lewat pertemuan itu, kedua belah pihak membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2025 dan kick-off persiapan musim haji 2026.

Dalam keterangan persnya, dikutip Kamis (12/6/2025) BP Haji menyebut Arab Saudi menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jemaah Indonesia hingga pengelolaan jemaah selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Catatan pertama menyebutkan pengelolaan haji Indonesia 2025 semrawut. "Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ungkap Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak saat konferensi pers di kantor BP Haji, Jl. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

BP Haji menilai pernyataan itu merupakan peringatan keras bagi Indonesia hingga memunculkan wacana pemotongan kuota haji Indonesia untuk musim berikutnya.

"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," kata Dahnil.

Selanjutnya, Arab Saudi menilai Indonesia tak transparan soal data kesehatan jemaah. Mereka protes kenapa Indonesia mengirim jemaah haji yang sudah mau meninggal, bahkan ada yang sudah meninggal saat di pesawat. Ini menjadi masalah serius bagi Arab Saudi.

Seperti diketahui, pengurusan jamaah wafat dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Seluruh jemaah akan dimakamkan di sana, tak dipulangkan ke negara asal.

Arab Saudi juga memberi catatan tentang istitha'ah jamaah haji Indonesia. Istitha'ah dalam hal ini adalah kemampuan secara kesehatan. Banyak jamaah Indonesia sebenarnya tidak layak pergi haji.

Terkait hal ini, BP Haji mengatakan harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Indonesia.

Terakhir masalah transportasi, konsumsi, dan akomodasi jamaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina juga menjadi evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini.

Sebelumnya diberitakan, bus yang

melayani penjemputan jamaah haji dari Muzdalifah ke Mina telat datang. Kondisi ini membuat banyak jamaah haji memutuskan jalan kaki. Sesampainya di Mina, banyak jemaah yang tak mendapat tenda untuk istirahat.

Dahnil menyatakan pemerintah berkomitmen untuk tetap mempertahankan kuota haji dengan pengelolaan haji yang lebih baik mulai tahun depan melalui BP Haji.

"Itu yang membuat kami agak kaget. Namun kemudian dari hasil diskusi di Kementerian Haji (Saudi),

dinyatakan karena tahun depan pengelolaan haji Indonesia itu tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden (Prabowo) membentuk badan setingkat Kementerian Haji, maka pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah menyatakan ini ada harapan dengan manajemen baru," papar Dahnil.

"Nah oleh sebab itulah wacana untuk pemotongan 50% itu tidak kami (Arab) kembangkan karena kami percaya Presiden Prabowo melalui badan yang baru dibentuk itu akan berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan," imbuhnya. (din,wid,rls,ant/dya)

JADWAL KEPULANGAN GELOMBANG I:

- 11 Juni 2025 (15 Zulhijah 1446 H): Awal kepulangan Gelombang I dari Makkah via Jeddah dan awal kedatangan di Indonesia
- 25 Juni 2025 (29 Zulhijah 1446 H): Akhir kepulangan Gelombang I
- 26 Juni 2025 (1 Muharam 1447 H): Tahun Baru Islam

JADWAL KEPULANGAN GELOMBANG II:

- 26 Juni 2025 (1 Muharam 1447 H): Awal kepulangan Gelombang II dari Madinah
- 2 Juli 2025 (7 Muharam 1447 H): Akhir keberangkatan dari Makkah ke Madinah
- 10 Juli 2025 (15 Muharam 1447 H): Akhir kepulangan Gelombang II
- 11 Juli 2025 (16 Muharam 1447 H): Akhir kedatangan Gelombang II di Indonesia



Jamaah Sakit Bisa Pulang Lebih Awal

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memprioritaskan jamaah haji Indonesia yang sakit dan membutuhkan perawatan segera di Tanah Air untuk mengikuti program tanazul atau pulang lebih awal. Jamaah dapat pulang lebih awal bersama kloter lain.

"Program ini diprioritaskan bagi jamaah yang sakit dan membutuhkan perawatan segera di Tanah Air. Selain itu, tanazul/mutasi kloter mempertimbangkan ketersediaan seat kosong pada penerbangan pulang di kloter tujuan," kata Kasi Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Daker Makkah, Dodo Murtado, di Makkah, dikutip Kamis (12/6/2025).

Dodo menjelaskan tanazul terbagi dua kategori, yakni jemaah sakit dan pengisian seat kosong. Dia mengatakan jemaah bisa pulang lebih awal dengan mengajukan surat rekomendasi.

"Untuk jamaah sakit, syarat yang harus disiapkan adalah surat rekomendasi dari petugas kesehatan kloter dan surat rekomendasi dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja Makkah," ujar Dodo.

Dia mengatakan program pengisian seat kosong ditujukan

untuk jamaah penggabungan ke kloter asal dalam embarkasi yang sama dan jemaah yang harus pulang lebih dulu karena alasan dinas.

Dodo mengatakan pengajuan tanazul disampaikan melalui pimpinan sektor kepada Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah. Dia mendoakan seluruh jamaah selamat sampai ke Tanah Air.

"Melalui program ini, diharapkan jemaah yang memerlukan pemulangan lebih awal dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan nyaman," kata Dodo.

Diketahui, ribuan jamaah haji yang tergabung dalam tujuh kelompok terbang (kloter) telah mendarat di sejumlah bandara di tanah air pada Kamis (12/6/2025) dinihari.

Tujuh kloter tersebut menandai fase pemulangan jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci ke Indonesia yang dimulai pada 11 Juni 2025.

Tujuh kloter yang pulang ke tanah air pada 11 Juni 2025 adalah jamaah gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025. Tujuh kloter tersebut adalah Kloter

01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 01), 01 Embarkasi Lombok (LOP 01),

Lalu, Kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB 01), 02 Embarkasi Surabaya (SUB 02), 01 Embarkasi Jakarta (JKS 01), dan 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JPG 01), 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 02).

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan, total terdapat 2.760 jamaah haji Indonesia dari tujuh kloter pada gelombang pertama yang telah meninggalkan Tanah Suci, Rabu (11/6/2025). (wid,rls,rrri/dya)

Pemkot Malang Gagas Payung Hukum PKL Bebas Pajak



Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Kamis (12/6/2025). (Santi/Indonesia)

Muthohirin, menyampaikan secara eksplisit, PKL tidak disebutkan dalam rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang baru saja disahkan oleh dewan. Namun, ia menegaskan pemkot tetap membuka ruang untuk penguatan perlindungan PKL melalui regulasi turunan.

"Memang PKL secara tertulis tidak ada di Perda ini, jadi itu memang beda ruang. Tapi bisa jadi nanti ada Perda atau Perwali khusus untuk mendetailkan perlindungan kepada PKL," ujar Ali saat ditemui Kamis (12/6/2025).

Menurut Ali, pembuatan aturan tersebut bisa menjadi tindak lanjut dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah sendiri.

Tujuannya, memastikan pelaku usaha kecil tidak terdampak oleh penerapan pajak daerah, khususnya di sektor kuliner dengan skala mikro.

"Kalau pun nanti ada inisiatif dari dewan, memungkinkan saja. Tentu itu akan kita bahas bersama. Perlindungan itu penting agar semangat kewirausahaan di level akar rumput tetap tumbuh," tambahnya.

Ali juga menyebut, pembahasan tentang perlindungan PKL sempat menjadi bagian dari diskusi internal dengan Wali Kota Malang, sehingga peluang regulasi turunan terbuka lebar. Menunggu hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak.

"Pak Wali juga dulu sempat membahas soal perlindungan PKL ini, jadi kami pastikan arah kebijakan ke sana tetap ada. Tinggal kita formulasikan, apakah cukup dengan Perwal atau butuh Perda," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Panitia Khusus (Pansus) PDRD DPRD Kota Malang, Indra Permana, menegaskan PKL tidak termasuk dalam subjek pajak sesuai regulasi yang baru. Pihaknya menilai penetapan batas omzet Rp15 juta per bulan sudah cukup untuk memilah

antara pelaku usaha besar dan usaha kecil.

"Jadi tidak ada istilah PKL dikenai pajak. Kita di pansus berpihak pada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Justru yang dikenakan pajak adalah pelaku usaha mamin dengan omzet minimal Rp15 juta per bulan," tegas Indra.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, menyatakan pemberlakuan ambang batas Rp15 juta telah diperkirakan berdampak pada potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setidaknya, sekitar 1.085 pelaku usaha diperkirakan akan bebas dari pajak.

"Estimasi kehilangan PAD sekitar Rp7 miliar. Tapi kami akan lakukan verifikasi ulang. Kalau memang harus kehilangan, kami akan sesuaikan targetnya nanti," terang Handi.

Ia menambahkan, proses evaluasi pendapatan akan dilakukan setelah triwulan kedua. Apabila terjadi deviasi yang cukup besar, maka kemungkinan revisi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) akan dipertimbangkan. (Santi/Dya)

MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggagas payung hukum khusus untuk menjamin pedagang kaki lima (PKL) bebas dari penarikan pajak.

Hal ini menyusul ditetapkannya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT) makanan dan minuman (mamin) dengan batas omzet Rp15 juta per bulan sebagai wajib pajak.

Wakil Wali Kota Malang, Ali

Pilot Project Pengelolaan Sampah Modern 12 Desa di Kabupaten Malang Disuntik Rp4,5 M

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendapat suntikan dana sebesar Rp4,5 miliar dari lembaga internasional, Alliance to End Plastic Waste (AEPW). Bantuan ini untuk pilot project pengelolaan sampah modern. Ada 12 desa di tiga kecamatan yang menjadi sasaran, yaitu Poncokusumo, Tumpang, dan Jabung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, mengatakan bantuan ini akan merealisasikan Program Bersih Indonesia. Yang merupakan upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ber-kelanjutan. Mulai dari tingkat rumah tangga hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

"Total bantuan dari AEPW untuk Program Bersih Indonesia di Kabupaten Malang mencapai Rp4,5 miliar. Bantuan ini tidak hanya berupa dana, tapi juga sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah," ujar pria yang akrab dengan sapaan Avi ini, dikutip pada Kamis (12/6/2025).

Dijelaskannya, bantuan yang telah diterima di antaranya terdiri dari dua unit mobil pick-up, 24 unit kendaraan roda tiga, 16 ribu tempat sampah rumah tangga, 200 unit tempat sampah non-rumah tangga, serta perlengkapan alat pelindung diri

(APD) bagi petugas lapangan.

Di tahap pertama ini, menurutnya nilai seluruh fasilitas yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp2,2 miliar. "Ke depan masih ada peruntukan lain berupa satu unit arm roll truck, dua unit kontainer, dan satu unit loader yang akan digunakan untuk mendukung operasional di TPA Paras Poncokusumo," lanjutnya.

Avi menyampaikan, penerapan pilot project atau proyek percontohan ini akan difokuskan di sekitar TPA Paras Poncokusumo, sebagai lokasi uji coba sistem pengelolaan sampah modern. Program ini mencakup kegiatan sosialisasi, distribusi tempat sampah, pemilahan sampah rumah tangga, hingga sistem pengangkutan dan pemrosesan di TPA.

Menurutnya, DLH bersama tim Program Bersih Indonesia telah menyosialisasikan konsep pemilahan sampah kepada 12 desa yang menjadi lokasi uji coba. Targetnya, layanan pengelolaan ini dapat menjangkau hingga 16 ribu kepala keluarga (KK).

Lebih lanjut, menurutnya pelaksanaan layanan pengangkutan sampah telah dibagi dalam tiga kloter. Kloter pertama dimulai pada 17 Maret 2025 di empat desa, yakni Duwet Krajan, Kenongo, Tulusbesar, dan

Wringinanom.

Kloter kedua berlangsung pada 11 Juni 2025 di Desa Jeru, Jambesari, Benjor, dan Kambangan. "Sementara empat desa sisanya akan segera menyusul setelah penjadwalan ulang oleh DLH," katanya.

Terkait dengan sistem pemilahan sampah yang dilakukan langsung di tingkat rumah tangga. Avi mengatakan, masyarakat telah diedukasi mengenai cara memisahkan sampah organik dan anorganik ke dalam dua jenis tempat sampah berbeda. Warna kuning untuk organik dan hijau untuk anorganik atau sampah kering.

"Setelah dikumpulkan, sampah yang telah dipilah akan dibawa ke TPA Paras Poncokusumo untuk diproses lebih lanjut. Sampah bernilai jual akan didaur ulang melalui kerja sama dengan industri daur ulang. Kemudian untuk sampah residu akan diolah menjadi bahan bakar alternatif atau dibakar dengan metode incinerator seperti yang dilakukan di fasilitas milik Kostrad," paparnya.

Sementara untuk sampah organik yang benar-benar murni, pihaknya



Salah satu bantuan untuk pengelolaan sampah modern di Kabupaten Malang. (dok. Prokopim Kab Malang)

mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan sebagai kompos alami. Di tiap rumah, sambungnya, akan dibuatkan lubang biopori sebagai media pengolahan sampah organik tersebut.

"Karena total potensi timbulan sampah di Kabupaten Malang ini mencapai 1.200 ton per hari. Jadi nanti kami juga akan tambah dua Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang bisa mengolah hingga 600 ton. Tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa memilah sampah dari sumbernya," pungkas Avi. (Santi/Dya)

Mitos dan Fakta Daging Kambing Benarkah Picu Darah Tinggi?

Daging kambing kerap dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Tapi, benarkah anggapan tersebut? Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu kandungan gizi dalam daging kambing.

Daging kambing kaya akan berbagai nutrisi penting, di antaranya protein tinggi, zat besi, dan vitamin B12. Protein berperan penting dalam pembentukan serta perbaikan jaringan tubuh. Zat besi diperlukan untuk membantu produksi sel darah merah, sementara vitamin B12 mendukung fungsi sistem saraf dan proses metabolisme dalam sel.

Namun, pada saat yang sama, daging kambing juga mengandung lemak jenuh, sehingga orang sering kali menghubungkan konsumsi daging kambing dengan peningkatan tekanan darah. Namun benarkah daging kambing menjadi penyebab darah tinggi? Berikut penjelasan mitos dan fakta seputar daging kambing.

Menyebabkan Darah Tinggi

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengonsumsi daging kambing memicu terjadinya hipertensi (tekanan darah tinggi).

Keyakinan ini cukup luas dan sering kali membuat orang enggan mengonsumsi daging

kambing, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah dengan tekanan darah.

Faktanya, makan daging kambing tidak menyebabkan hipertensi. Daging kambing memiliki kandungan lemak jenuh yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daging merah lainnya seperti daging sapi. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang diketahui dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, yang dapat berkontribusi pada risiko penyakit jantung dan hipertensi. Namun, karena kandungan lemak jenuh pada daging kambing rendah, mengonsumsinya tidak secara langsung menyebabkan peningkatan tekanan darah.

Daging kambing justru diperkaya dengan lemak tak jenuh, yang dapat berguna bagi tubuh. Lemak tak jenuh dikenal baik untuk kesehatan jantung dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah. Lemak tak jenuh juga dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL), yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Faktor yang sering memicu hipertensi setelah mengonsumsi daging kambing adalah kesalahan dalam mengolah daging kambing itu sendiri. Metode pengolahan yang melibatkan banyak minyak, garam, dan bahan-bahan berlemak tinggi lainnya dapat meningkatkan kadar natrium

dan lemak jenuh dalam hidangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tekanan darah.

Tidak Baik untuk Ibu Hamil

Apakah daging kambing tidak baik untuk ibu hamil? Hal ini sering dianggap benar oleh sebagian orang karena sifatnya yang memicu panas. Namun, berdasarkan hasil penelitian ilmiah, mitos ini tidak sepenuhnya benar.

Daging kambing ternyata sangat kaya akan nutrisi yang baik untuk ibu hamil. Dalam daging kambing terdapat zat besi yang tinggi, yang sangat penting untuk membantu pembentukan hemoglobin dan mencegah anemia pada ibu hamil. Selain itu, daging kambing juga mengandung protein, vitamin B kompleks, dan mineral lainnya, seperti seng dan selenium, yang penting bagi perkembangan janin.

Namun, penting untuk tidak mengonsumsi daging kambing secara berlebihan. Penggunaan yang berlebihan bisa meningkatkan suhu tubuh dan meningkatkan risiko keguguran. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mengatur jumlah konsumsi daging kambing sesuai dengan kebutuhan nutrisinya.

Dalam kesimpulannya, daging kambing sebenarnya baik untuk ibu hamil karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Namun, konsumsi dalam jumlah yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Jadi, jangan takut untuk menikmati olahan daging kambing yang lezat selama kehamilan, asalkan dengan porsi yang cukup.

Lebih Bergizi daripada Daging Sapi

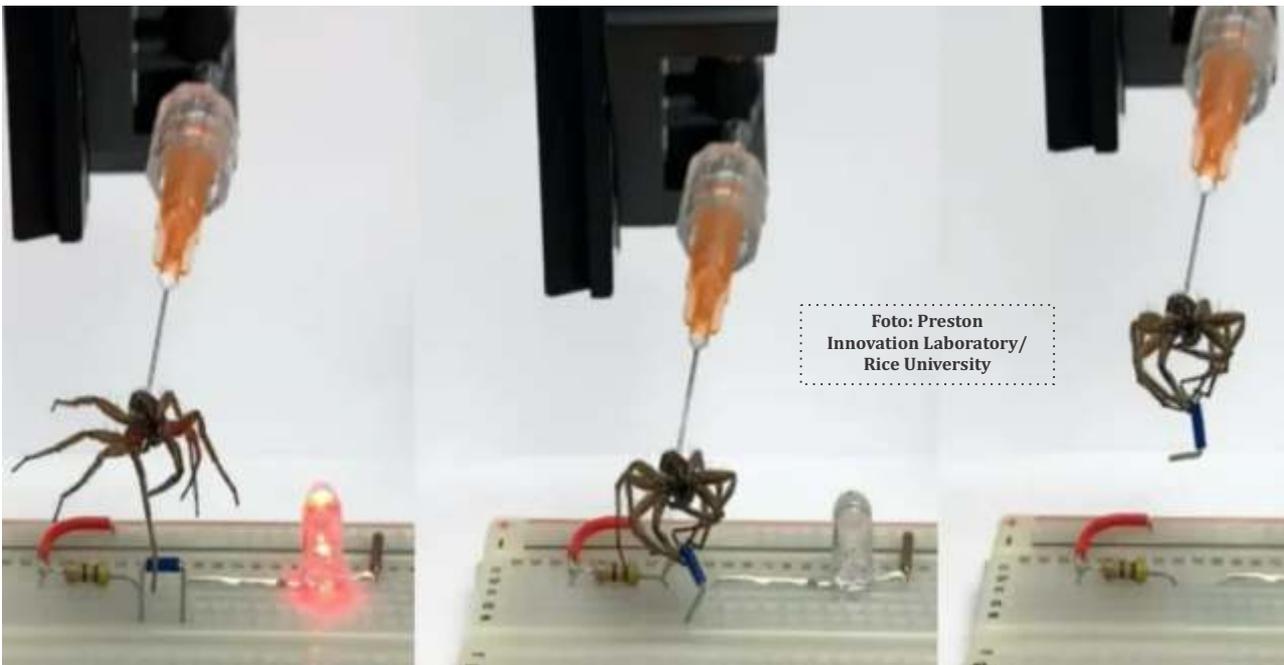
Daging kambing memang memiliki beberapa mitos dan fakta seputar kandungan nutrisinya yang sering kali dianggap lebih bergizi daripada daging sapi. Salah satu fakta yang benar adalah daging kambing memiliki kandungan asam lemak tak jenuh lebih banyak daripada daging sapi. Lemak tak jenuh ini memiliki manfaat yang lebih baik bagi kesehatan tubuh kita daripada lemak jenuh.

Selain itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa daging kambing memiliki kandungan lemak jenuh yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Jumlah lemak jenuh dalam daging kambing hanya sekitar 8,5 kali lebih rendah daripada daging sapi. Lemak jenuh cenderung meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga mengonsumsi daging kambing yang rendah lemak jenuh dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

Namun, walaupun memiliki beberapa keunggulan dari segi nutrisi, penting untuk diingat bahwa keseimbangan dalam pola makan adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan kita. Daging kambing maupun daging sapi, baiknya dikonsumsi dalam jumlah yang tepat sesuai kebutuhan tubuh dan dibarengi dengan konsumsi makanan lain yang juga kaya akan nutrisi. (nei,ist/dya)



Bangkai Laba-Laba Disulap Jadi Robot Penjepit



volume cairan berkurang, kaki-kaki mereka kembali ke posisi alami, yaitu posisi cakar.

“Kebetulan laba-laba, setelah mati, merupakan arsitektur yang sempurna untuk penjepit berskala kecil yang berasal dari alam,” kata Daniel Preston dari Rice’s George R. Brown School of Engineering, dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip IFL Science.

Dengan menggunakan jarum dan lem super, para peneliti membuat segel di ruang prosoma sehingga mereka dapat menyuntikkan udara secara efektif ke dalam tungkai laba-laba, membuat kaki hewan tersebut bisa mengembang dan memanjang. Dengan mengurangi tekanan udara tersebut, kaki laba-laba dapat menutup kembali, sehingga menciptakan mesin penjepit yang terbuat dari bahan biotik.

Mengenai bagaimana nekrobot laba-laba mati dapat dimanfaatkan, penjepit mekanis biotik ini ternyata bisa digunakan cukup lama, bertahan hingga 1.000 kali percobaan sebelum akhirnya hancur dan tak bisa digunakan lagi.

Dengan bantuan sedikit pelapis, Preston menduga bahwa penjepit biotik dapat digunakan dalam tugas-tugas mengambil dan meletakkan barang, seperti dalam perakitan mikroelektronika.

Penjepit mekanis ini juga dapat dimanfaatkan untuk menangkap serangga di alam, papar penulis utama studi dan mahasiswa PhD Rice University Engineering, Faye Yap. (nei,ist/dya)

Tim ilmuwan dari Rice University berhasil mengubah bangkai laba-laba serigala menjadi alat robotik yang mereka namai nekrobot atau nekrobotik. Inovasi ini dipublikasikan dalam sebuah makalah ilmiah pada tahun 2022 di jurnal *Advanced Science*, lengkap dengan video yang menunjukkan cara kerja alat tersebut.

Dalam sebuah video, terlihat seekor laba-laba serigala yang telah mati digunakan sebagai robot penjepit untuk mengambil suatu objek. Demonstrasi tersebut bahkan memperlihatkan bagaimana nekrobot mampu mengangkat bangkai laba-laba lain, menunjukkan kemampuannya

dalam menjepit dan mengangkat benda dengan cukup presisi.

Secara sederhana, inovasi ini mengubah tubuh laba-laba mati menjadi alat penjepit layaknya mesin. Dengan memanfaatkan struktur tubuh laba-laba yang secara alami memiliki sistem penjepit pada kakinya, para ilmuwan berhasil menciptakan teknologi baru yang unik dari bahan biologis yang sebelumnya tak terpakai.

Proses mengubah bangkai laba-laba menjadi robot memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai cara laba-laba bergerak. Berbeda dari kebanyakan hewan yang menggunakan otot, laba-laba memiliki

mekanisme unik dalam mengontrol gerakan kakinya.

Laba-laba menggunakan sistem tekanan hidrolik untuk menggerakkan delapan kakinya. Artinya, pergerakan kaki laba-laba dikendalikan oleh aliran cairan tubuh yang menciptakan tekanan internal. Pengetahuan inilah yang dimanfaatkan ilmuwan untuk mengaktifkan kembali fungsi kaki laba-laba meskipun tubuhnya sudah mati, sehingga dapat dijadikan alat penjepit layaknya robot.

Struktur khusus yang disebut ruang prosoma memungkinkan mereka menyalurkan cairan tubuh ke dalam anggota lain, membuat mereka bisa memanjangkan kakinya. Ketika



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Siapa Sangka, Bekas Tambang Jadi Surga Wisata



Danau Quarry Jayamix, Bogor



Tebing Breksi, Yogyakarta



Bukit Jaddih, Madura

Kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat belakangan ini mendapat perhatian publik akibat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Namun, perlu diketahui bahwa Raja Ampat bukan satu-satunya wilayah yang menjadi lokasi aktivitas tambang.

Di Indonesia, terdapat sejumlah area bekas pertambangan yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Menariknya, lokasi-lokasi tersebut telah dialihfungsikan menjadi destinasi wisata. Penasaran di mana saja? Yuk, simak pembahasannya berikut ini.

Tebing Koja Kandang Godzilla, Tangerang

Meski disebut sebagai Kandang Godzilla, jangan harap kamu akan bertemu sosok legenda monster raksasa asal Jepang di film ya. Kamu bakal disuguhkan dengan pemandangan tebing-tebing bekas tambang dengan kolam dan sawah yang hijau di sekitarnya.

Selain panorama tebing-tebing bekas tambang, kamu juga bisa mengelilingi danau yang ada di sekitar tebing. Danau tersebut terbentuk dari galian tambang yang sudah tidak digunakan yang lama-lama terisi oleh air hujan.

Tebing Koja Kandang Godzilla menawarkan tempat unik bagi kamu

yang ingin berburu spot foto. Datanglah di pagi hari, karena kamu dapat melihat siluet mentari pagi berpadu dengan embun dan kabut tipis.

Danau Quarry Jayamix, Bogor

Terletak di Desa Nuggaherang, Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Danau Quarry Jayamix awalnya merupakan sebuah cekungan bekas lahan pertambangan. Air di danau tersebut berasal dari tetesan air hujan yang lama-lama akhirnya membentuk danau.

Dulunya Danau Quarry merupakan bekas pertambangan pemecah batu pembuatan beton, namun karena banyak protes dari warga, akhirnya proyek tersebut dihentikan.

Danau ini merupakan danau tadah hujan yang dulunya bernama Danau Jayamix Rumpin. Air danau berwarna hijau toska, bukan biru seperti danau pada umumnya.

Tebing Breksi, Yogyakarta

Bergeser ke Yogyakarta, Kota Gudeg juga memiliki destinasi wisata yang tercipta dari aktivitas pertambangan.

Bernama Tebing Breksi, objek wisata ini terletak di Desa Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada awalnya lokasi wisata ini

adalah sebuah lokasi tambang batu breksi, namun akhirnya penambangan pun dihentikan. Dari kegiatan tambang itulah menyebabkan pahatan-pahatan tebing yang unik.

Tempat ini sangat cocok buatmu yang ingin berburu spot selfie dengan panorama di atas tebing breksi yang wisatawan. Saat berada di puncaknya, kamu juga dapat melihat pemandangan berupa Candi Barong, Gunung Merapi, Candi Prambanan, Candi Sojiwan, hingga kota Yogyakarta. Waktu terbaik untuk mengunjungi Tebing Breksi adalah di pagi hari dan sore hari, sebab di waktu ini membuatmu terhindar dari sengatan matahari yang panas. Jangan khawatir, kamu tetap bisa menikmati pemandangan yang indah.

Danau Kaolin, Belitung

Tempat wisata berikutnya yang tercipta dari aktivitas pertambangan adalah Danau Kaolin di Belitung.

Danau ini menjadi saksi bisu kekayaan tambang Belitung yang terbentuk dari ceruk besar bekas penggalian kaolin yang dieksploitasi besar-besaran di kawasan tersebut.

Terletak di Desa Air Raya Tanjungpandan, kubangan itu kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Uniknya, air Danau Kaolin berwarna biru muda dan dikelilingi daratan berwarna putih. Paduan warna yang menakjubkan

untuk diabadikan dengan lensa kamera. Panorama di Danau Kaolin akan mengingatkan kita pada Kawah Putih Ciwidey, Bandung. Bedanya, bau belerang yang menyengat tidak menguar dari Danau Kaolin.

Bukit Jaddih, Madura

Awalnya, Bukit Jaddih merupakan lokasi penambangan batu kapur putih yang aktif dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian warga sekitar. Selama bertahun-tahun, aktivitas pertambangan tersebut membentuk lanskap unik berupa tebing-tebing tinggi dan cekungan besar yang kini menjadi ciri khas kawasan ini.

Jika dilihat sekilas, Bukit Kapur Jaddih memang memiliki kemiripan dengan Bukit Kapur Rengel di Tuban maupun Bukit Kapur Sekapuk di Gresik. Ketiganya sama-sama menawarkan pemandangan tebing-tebing kapur yang eksotis dan menarik perhatian wisatawan. Namun, yang membedakan Bukit Jaddih adalah keberadaan sebuah kolam renang alami yang cukup unik, bernama "Gua Potte", yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, terutama saat cuaca sedang terik. Tak hanya itu, keistimewaan Bukit Jaddih tidak berhenti di situ. Area bekas penambangan kapur ini juga menyimpan sejumlah gua-gua kecil yang terbentuk sebagai sisa dari proses penambangan di masa lalu. (nei,ist/dya)

Utang Negara (dari Hal 1) ...

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Mei 2025 mengindikasikan kondisi pendapatan konsumen tergerus, sementara proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.

Rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 74,3 persen, menyusut dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 74,8 persen.

Di sisi lain, proporsi pendapatan untuk pembayaran utang (debt to income ratio) meningkat menjadi 10,8 persen pada Mei 2025 dari 10,5 persen pada April 2025. Sementara itu, proporsi pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) tercatat relatif stabil di angka 14,9 persen.

"Proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Kamis (12/6/2025).

Dia menjelaskan penurunan proporsi konsumsi tercatat pada seluruh kelompok pengeluaran, kecuali pada kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta yang masih mencatatkan konsumsi sebesar 71,3 persen.

Sementara itu, BI mencatat terjadi peningkatan tabungan terlihat pada kelompok pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta dengan porsi 14,9 persen dan Rp4,1 juta hingga Rp5 juta dengan porsi 15,3 persen, meskipun menurun pada kelompok lainnya.

Secara umum, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2025 tercatat sebesar 117,5, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 121,7. Ini ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

IKE dan IEK masing-masing tercatat sebesar 106,0 dan 129,0. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 113,7 dan 129,8.

Persepsi responden terhadap ekspektasi penghasilan enam bulan ke depan masih optimis untuk kelompok pengeluaran Rp1 juta-Rp2 juta (132,8), sedangkan kelompok pengeluaran lainnya tercatat turun.

"Keyakinan terhadap penghasilan saat ini juga relatif terjaga, meskipun secara umum mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya," jelas Denny.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, nilai tertinggi pada responden dengan pengeluaran diatas

Rp5 juta dengan porsi 120,5, diikuti oleh kelompok Rp4,1 juta-Rp5 juta (117,7). Namun, dibandingkan bulan sebelumnya, tingkat optimisme ini menurun pada semua kelompok pengeluaran.

Sementara itu, optimisme terhadap pembelian barang tahan lama (durable goods) masih berada di zona optimis, terutama pada kelompok pengeluaran Rp1 juta-Rp2 juta yang menunjukkan peningkatan menjadi 100,7. Namun, kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan, terutama pada kelompok di atas Rp5 juta dengan porsi 109,0 dan Rp4,1 juta-Rp5 juta dengan porsi 101,1.

Berdasarkan kelompok usia, keyakinan terhadap pembelian barang tahan lama juga masih terjaga untuk responden berusia 20-50 tahun, namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Kemenkeu Pastikan Bayar

Beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025, yakni sebesar Rp178,9 triliun.

Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan memastikan akan membayar utang yang jatuh tempo pada Juni 2025 secara tepat waktu dan jumlah, baik untuk surat utang maupun pinjaman.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengklaim selama ini pemerintah juga tidak pernah terlambat dalam menunaikan kewajiban pembayaran utang dan selalu mengelolanya dengan baik.

"Hal yang penting semua kewajiban utang kita tunaikan dengan baik, semua kewajiban kita bayar secara tepat waktu tepat jumlah semua kita laksanakan dengan baik kita kelola dengan baik," ujar Suminto saat di-temui di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Nilai utang jatuh tempo pada Juni tercatat jauh lebih besar dibanding utang jatuh tempo pada bulan-bulan sebelumnya. Misalnya, utang jatuh tempo pada Mei 2025 hanya Rp42,4 triliun, dan April sebesar Rp22 triliun. Kemudian, Maret Rp25,3 triliun, Februari Rp48,9 triliun, dan Januari Rp37 triliun.

Menurut Suminto, nilai utang tersebut bervariasi karena tenggat jatuh tempo terdistribusi pada berbagai tanggal dan bulan. Namun, Suminto memastikan semua utang tersebut sudah masuk ke perencanaan dan dikelola dengan baik.

"Mengenai nilainya kan relatif, dari bulan ke bulan bervariasi jatuh tempo terdistribusi di berbagai tanggal di berbagai bulan," ujarnya.

Menyitir situs resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), nilai utang Indonesia yang jatuh tempo dalam bentuk surat berharga negara (SBN) pada Juni 2025 adalah Rp158,47 triliun, berdasarkan data outstanding 2 Mei 2025.

Berdasarkan dokumen Profil Utang Pemerintah Pusat edisi Mei 2024, utang jatuh tempo pemerintah pusat adalah Rp800,33 triliun pada 2025. Hal tersebut terdiri dari Rp705,5 triliun SBN dan Rp94,83 triliun pinjaman.

Sebelumnya, Kemenkeu dan BI membentuk tim untuk menangani pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada tahun depan dengan angka hampir Rp800 triliun.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan menyebut bahwa pemerintah percaya diri untuk dapat mengatasi utang yang akan jatuh tempo pada tahun depan, dengan syarat pasar keuangan dalam kondisi baik, serta kepercayaan dari masyarakat dan investor terjaga.

"Jadi ini sudah ada timnya dari pemerintah dan BI untuk mendiskusikan, menangani SBN yang jatuh tempo tahun depan, yang sebetulnya diterbitkan dalam rangka pandemi," kata Deni saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).

Sebelumnya, Bank Indonesia mengumumkan utang luar negeri Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai US\$ 430,4 miliar atau sekitar Rp 7.144,6 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 6,4 persen dari triwulan IV 2024 sebesar 4,3 persen.

BI mencatat utang luar negeri pemerintah juga naik 7,6 persen secara tahunan pada triwulan I 2025. Utang pemerintah kini sebesar US\$ 206,9 miliar atau lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 3,3 persen secara tahunan.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah digunakan antara lain untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,4 persen; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,5 persen; jasa pendidikan 16,5 persen; konstruksi 12,0 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,7 persen.

Pada triwulan I 2025, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 195,5 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 1,2 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,6 persen. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,7 persen

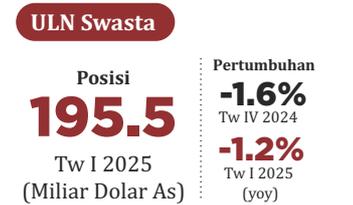
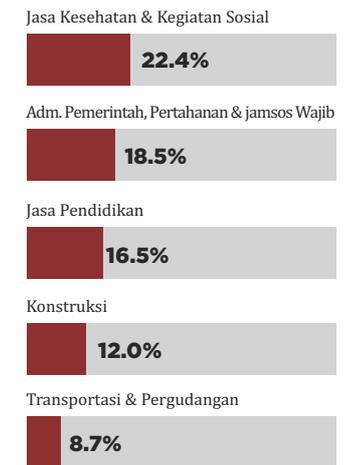
pada triwulan IV 2024.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian. Sektor ini juga memiliki pangsa mencapai 79,6 persen dari total utang luar negeri swasta. (wid,rls dat,bis/dya)

UTANG LUAR NEGERI INDONESIA



ULN pemerintah di Sektor Produktif dan Belanja Prioritas



TEKA-TEKI JATUHNYA PESAWAT AIR INDIA

Baru 5 Menit Mengudara saat Cuaca Cerah & Jarak Pandang Aman

Penyebab jatuhnya pesawat Air India AI171 di Ahmedabad, Kamis (12/6/2025), masih menjadi reka-teki. Cuaca diklaim dalam kondisi stabil saat pesawat lepas landas.

Pesawat Air India hari ini jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Ahmedabad di Negara Bagian Gujarat, India barat laut, Kamis (12/6/2025). Pesawat membawa 242 penumpang itu dijadwalkan terbang menuju London, Inggris.

Pesawat Air India 171, Boeing 787 Dreamliner, itu jatuh di area Meghani kota itu hanya sekitar 5 menit setelah meninggalkan landasan. Penyebab jatuhnya kini masih diselidiki.

Pakar keselamatan penerbangan, Marco Chan, menduga cuaca bukanlah faktor kecelakaan. Ia, berdasarkan laporan BBC, menyebut cuaca dalam kondisi stabil saat pesawat lepas landas.

Berdasarkan data METAR (METeorological Aerodrome Report), angin permukaan bertiup ringan dengan jarak pandang 6 kilometer.

"Tidak ada awan atau fenomena cuaca signifikan yang dilaporkan," ujar Chan.

Dosen Senior Operasi Penerbangan di Buckinghamshire New University (BNU) sekaligus mantan pilot berpengalaman itu menambahkan, tak ada indikasi pergeseran angin, badai, atau kondisi ekstrem lain yang biasanya menjadi faktor risiko penerbangan.

AI171 sempat mengirim sinyal darurat "Mayday" sebelum hilang dari radar pada ketinggian sekitar 625 kaki.

Kepala Kepolisian Ahmedabad menyatakan tidak ada tanda korban selamat. "Pesawat menghantam wisma dokter saat jatuh," kata seorang perwira senior kepada wartawan di lokasi kejadian.

Polisi menyebut sekitar 70 hingga 80 persen area terdampak telah dibersihkan. Petugas masih menyisir sisa area untuk menemukan korban dan mengamankan puing.

Jatuh di Asrama Dokter

Pesawat Air India AI171 ternyata jatuh di ruang makan asrama B.J. Medical College yang dikelola



Petugas memadamkan api dan mengevakuasi jenazah para korban jatuhnya pesawat Air India jenis Boeing 787-8 Dreamliner di Kota Ahmedabad, Kamis (12/6/2025). (reuters.ist)

pemerintah. Hal ini menewaskan banyak mahasiswa kedokteran di dalamnya.

Pembaruan ini melengkapi fakta bahwa pesawat jatuh di pemukiman padat penduduk. Belum diketahui pasti berapa jumlah total mahasiswa yang menjadi korban.

Polisi India memberi update terbaru korban dari jatuhnya pesawat Air India AI171. Disebutkan hingga kini sudah ada 100 jenazah ditemukan.

Angka ini memperbarui data sebelumnya. Di mana tim penyelamat menyebut ada 30-35 jenazah telah ditemukan dari lokasi kejadian.

Kementerian Penerbangan India mengonfirmasi operasional penerbangan di Bandara Ahmedabad telah kembali normal sejak pukul 16.05 waktu setempat.

"Protokol keselamatan di bandara

tertetap dijalankan dengan ketat," tulis pernyataan resmi kementerian melalui akun X.

Investigasi penyebab jatuhnya pesawat masih berlangsung. Maskapai Air India dan pihak Boeing menyatakan tengah menghimpun data teknis dan kesaksian lapangan.

Kecelakaan pesawat Air India pada Kamis ini merupakan insiden pertama pesawat Boeing 787 Dreamliner yang menyebabkan korban jiwa, menurut pangkalan data penerbangan Aviation Safety Network.

Dari total 170 insiden yang tercatat dialami pesawat tipe Boeing 787 sejak penerbangan perdananya pada tahun 2009, baru kali ini tercatat insiden yang memakan korban tewas.

Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil (DGCA) India memastikan bahwa ada 242 orang dalam pesawat

tersebut, termasuk dua pilot dan sepuluh awak penerbangan.

Surat kabar Indian Express pada awalnya melaporkan bahwa sekurangnya 150 orang tewas dalam kecelakaan itu. Namun, dalam laporan terbarunya, harian tersebut melaporkan bahwa semua 242 orang di pesawat nahas tersebut tewas.

Meski penyebab kecelakaan tersebut masih diselidiki, sejumlah ahli menyampaikan dugaan bahwa pesawat tersebut jatuh karena menabrak sekawanan burung saat lepas landas. (wid, rtr, ist/dya)

KRONOLOGI JATUHNYA PESAWAT AIR INDIA

- **Pukul 13:30 waktu setempat (08:00 GMT / 09:00 BST)**
Pesawat masih berada di darat dengan kecepatan nol.
- **Pukul 13:34**
Kecepatan mulai meningkat, namun posisi masih di permukaan.
- **Pukul 13:38**
Pesawat naik hingga 625 kaki dengan kecepatan 174 knot. Setelah itu, sinyal penerbangan menghilang.
- **Pukul 13:39**
Kontrol lalu lintas udara mencatat pesawat lepas landas dari landasan pacu 23. Tak lama kemudian, pesawat mengirimkan sinyal darurat "Mayday". Tidak ada komunikasi lanjutan setelah panggilan itu.



solid dan tidak ada kecelakaan fatal. Meskipun masalah baterai sempat membuat armada tidak beroperasi.

Insiden kecelakaan tersebut muncul saat pembuatan pesawat itu berupaya membangun kembali kepercayaan terkait keselamatan pada jetnya dan meningkatkan produksi di bawah Kepala Eksekutif baru Kelly Orthberg. (wid, rla, ist/dya)

Saham Boeing Anjlok Hampir 8 Persen

SAHAM produsen pesawat Boeing (BA.N) turun hampir 8 persen dalam perdagangan pra-pasar AS pada hari Kamis (12/6), setelah pesawat Air India yang membawa 242 orang, jatuh beberapa menit setelah lepas landas dari kota Ahmedabad di India barat.

Berdasarkan laporan Reuters, Saham Boeing turun sekitar 7,5 persen menjadi USD 197,82 dalam perdagangan pra-pasar. Analisis dari IG Group, Chris Beauchamp, mengatakan penurunan saham tersebut merupakan reaksi spontan pasar.

"Ini adalah reaksi spontan (terhadap insiden tersebut) dan ada kekhawatiran baru mengenai masalah yang melanda pesawat

Boeing dan Boeing sendiri dalam beberapa tahun terakhir," kata Chris Beauchamp, analis di IG Group.

Adapun Menteri Kesehatan Federal India mengatakan "banyak orang" tewas dalam kecelakaan itu. Pesawat itu sedang menuju Bandara Gatwick di Inggris. Sementara petugas polisi mengatakan pesawat itu jatuh di daerah sipil dekat bandara Ahmedabad.

Belum jelas apa yang menyebabkan kecelakaan itu. Boeing mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya mengetahui laporan awal dan sedang berupaya mengumpulkan informasi lebih lanjut.

Boeing 787 adalah seri jet terbaru dengan catatan keselamatan yang